

JURNAL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010**



Diajukan oleh:

Tira Safira Frederica

NPM : 160512283

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010**



**Diajukan oleh:
Tira Safira Frederica**

**NPM : 160512283
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari/tanggal: Senin, 9 November 2019
Dosen Pembimbing,**

G. Aryadi, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

**FAKULTAS
HUKUM**

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *HEARSAY EVIDENCE* SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010

Tira Safira Frederica

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: tirasafira2@gmail.com

Abstract

The application of the judicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia was granted by Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra led to an expansion of the meaning of witnesses contained in the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 to be a person who does not have to hear, see and experience a criminal event itself, provided there is relevance to the case being processed. This research uses normative legal research that uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials obtained from books, research results, the internet, and the opinion of sources. The existence of the Constitutional Court's Decision does not necessarily make the witness of hearsay evidence be used as a strong witness, it must be associated with a testimony and other evidence. The Constitutional Court's ruling does not always bind the judge, returning to the judge's discretion, bearing in mind the judge's conviction when deciding on a case. The witness testimony from hearsay evidence will be used by the judge as a clue if the statement is relevant to witnesses and other evidence.

Keywords: witnesses, hearsay evidence, judge, Constitutional Court Decision.

1. PENDAHULUAN

Tahap pembuktian merupakan tahap yang penting dalam proses perkara pidana, karena yang dicari di dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pertanggungjawaban pidana). Dalam menjatuhkan suatu putusan minimal harus ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ada 5 macam alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan dari orang yang mendengar, melihat dan mengalami tentang suatu peristiwa pidana. Pengertian ini bertentangan dengan Pasal 65 KUHAP yang memuat hak terdakwa, dimana terdakwa berhak untuk mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan bagi dirinya, “menguntungkan bagi dirinya” belum

tentu saksi itu mendengar, melihat dan mengalami. Pada Tahun 2010, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengajukan pengujian UU terhadap UUD terkait dengan perkara yang sedang dijalaninya dimana beliau sebagai terdakwa, tidak dipenuhi haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan beliau, terdapat perluasan makna saksi, menjadi saksi tidak harus mendengar, melihat dan mengalami namun harus ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 185 (5) KUHAP yang menyatakan baik pendapat maupun rekaan, bukan merupakan keterangan saksi. Dari Putusan ini belum diketahui apakah saksi *testimonium de auditu* atau dikenal sebagai saksi *hearsay evidence* menjadi diakui sebagai saksi yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan latar belakang

permasalahan tersebut, salah satu persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti adalah soal **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi *hearsay evidence* sebagai dasar putusan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk memperoleh data tentang Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

2. METODE

Jenis penelitian hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1).
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 184 ayat (1) a, Pasal 116 ayat (3).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari:

- 1) buku, hasil penelitian, internet;
- 2) pendapat hukum dari narasumber.

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder, dan wawancara dengan narasumber yaitu P. Cokro Hendromukti, S.H. dan Suryo Hendratmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang umum ke pembahasan yang khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai peraturan hukum pidana dan yang khusus berupa hasil penelitian tentang Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Kekuatan Saksi *Hearsay Evidence*

1. Kekuatan Pembuktian

Sudikno memberikan pengertian bahwa pembuktian adalah sesuatu yang bersifat historis yang mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang

harus dibuktikan.¹ Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu.²

Kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti lain.³

2. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 26: "Saksi adalah orang

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3. Hearsay Evidence

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.⁵

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

¹ Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 151

² Riawan Tjandra W., dan H.Chandera., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.62.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

⁴ Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian*, Penerbit ErlanggaRaih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, hlm. 23.

⁵ Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 264.

- diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
 3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kekuatan Hukum Putusan
Jenis putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut atau dikenal dengan “putusan akhir” dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa dinamakan dengan “putusan sela”.⁶
 4. Perubahan Pengertian Saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 konsep saksi berubah menjadi saksi tidak harus orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri asal relevan

dengan perkara yang sedang dijalani.

5. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Amarnya menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a

⁶ Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201-202.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

C. Penerapan Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Pada dasarnya keterangan saksi adalah apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, itu yang merupakan keterangan saksi yang harus diterapkan pada saat dijadikan saksi dihadapan persidangan. Adakalanya saksi tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri (*hearsay evidence*), saksi hanya mendengar dari orang lain, kesaksian ini sebenarnya tidak bisa diambil oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, namun hakim bisa menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti petunjuk, namun harus ditanyakan bagaimana asal usul keterangan yang dinyatakan dalam persidangan oleh saksi *hearsay evidence*, bila tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang menjadi perkara maka keterangan tersebut tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim. Ketika saksi pernah mendengar dari keterangan para pihak sendiri, maka keterangan itu dapat dijadikan

pertimbangan hakim, sepanjang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Disini status saksi *hearsay evidence* hanya sebagai tambahan alat bukti, tetap harus ada keterangan saksi lain yang merupakan saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri dimana keterangannya bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi *hearsay evidence* supaya keterangannya bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 ditemukan adanya perluasan saksi, saksi tidak harus yang mendengar, melihat dan mengalami asal relevan dengan kejadian yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak serta merta menghapuskan atau menggantikan Pasal 185 ayat (5) KUHAP meskipun berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut hanya menjadi pedoman hakim dalam memeriksa keterangan saksi yang didengar dari orang lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan saksi, saksi tidak harus yang mendengar, melihat dan mengalami mengarah pada saksi

hearsay evidence. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak mengubah status saksi *hearsay evidence*, saksi *hearsay evidence* tetap menjadi petunjuk, bukan merupakan saksi, karena keterangannya masih harus didukung dengan alat bukti yang lain, jadi istilahnya saksi *hearsay evidence* tidak bisa berdiri sendiri, selama keterangannya bersesuaian dengan saksi fakta lain baru bisa dijadikan pertimbangan hakim oleh hakim.

Saksi *hearsay evidence* dapat disumpah asalkan bukan saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu: keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah adalah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Selain yang dikecualikan tersebut dapat disumpah asalkan saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan menghendaki dijadikan saksi, juga apabila jaksa dan terdakwa tidak keberatan maka bisa dibawah sumpah, tapi jika jaksa dan

terdakwa keberatan maka tidak bisa disumpah.

Saksi *hearsay evidence* dapat disumpah asalkan bukan saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu: keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah adalah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Selain yang dikecualikan tersebut dapat disumpah asalkan saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan menghendaki dijadikan saksi, juga apabila jaksa dan terdakwa tidak keberatan maka bisa dibawah sumpah, tapi jika jaksa dan terdakwa keberatan maka tidak bisa disumpah.

Penulis mengambil 2 (dua) contoh putusan terkait saksi *hearsay evidence*, yang pertama dengan Nomor Register Perkara 263/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Nama terdakwa Syawal Alias Sawal Kedua dengan Nomor Register Perkara 310/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Nama terdakwa H.Muhsin.

Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait perluasan makna saksi ini untuk

kepentingan terdakwa, namun dari kedua putusan tersebut sama-sama menghadirkan saksi *hearsay evidence*, baik dari pihak penasihat hukum maupun penuntut umum. Terdapat *visum et repertum*, dimana *visum et repertum* tersebut menguatkan keterangan yang diberikan oleh saksi *hearsay evidence* yang dihadirkan oleh penuntut umum sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat hakim, dari contoh perkara yang penulis cermati, keterangan saksi *hearsay evidence* akan tetap dipertimbangkan dan dihubungkan dengan saksi yang lain meskipun saksi tersebut juga merupakan saksi yang lemah. Biasanya karena minim bukti, jadi dari semua bukti yang ada dirangkai menjadi suatu pertimbangan sehingga terakumulasi atau terbentuk keyakinan majelis hakim jika terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan dalam pasal itu panjang, karena hakim harus menyusun satu persatu. Biasanya saksi yang tidak kuat seperti ini nantinya keterangannya akan dikaitkan dengan barang bukti lain, misalnya *visum et repertum*. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mutlak harus diikuti karena hakim dalam memutus perkara harus yakin dan tidak boleh ragu, sedangkan keterangan saksi *hearsay evidence* tanpa bukti yang lain harus dikesampingkan.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas, penulis menarik suatu simpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai

berikut: Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi *hearsay evidence* dijadikan dasar pertimbangan putusan oleh hakim sejauh keterangan saksi ada relevansinya dengan perkara yang sedang berjalan dan sesuai dengan keterangan saksi fakta dan alat bukti lain, tidak bisa berdiri sendiri. Saksi *hearsay evidence* dapat disumpah, asalkan bukan saksi sebagaimana dikecualikan dalam KUHAP. Prakteknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak hanya untuk kepentingan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, melainkan juga penting bagi penegakan hukum pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pertanggungjawaban pidana.

5. REFERENSI

- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riawan Tjandra W. dan H.Chandera, 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro R, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbitan “Sumur Bandung”, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://www.bphn.go.id>.